

ANALISIS REKRUTMEN DAN KADERISASI PARTAI POLITIK PADA FENOMENA CALON TUNGGAL PETAHANA STUDI KASUS : PILKADA KABUPATEN PATI 2017

Danny Widodo Uji Prakoso¹
Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro
¹prakosodanny@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mendiskusikan tentang fenomena Prosesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pati tahun 2017 yang sangat menarik untuk dikaji karena hanya diikuti satu pasang calon yang harus bersaing dengan kotak kosong. Fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan prosesi kaderisasi dan rekrutmen partai politik di Kabupaten Pati karena 8 dari 9 partai politik lebih memilih mengusung satu calon, sedangkan satu partai lainnya tidak dapat mengusung kandidat karena jumlah kursi yang dimiliki kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang terjadi di internal partai politik khususnya terkait penerapan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik serta prosesi kandidasi di semua partai sehingga hanya muncul satu pasang calon saja. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan cara melakukan wawancara ke seluruh partai politik di Kabupaten Pati dan juga kepada tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Pati mengenai tanggapan mereka terhadap fenomena yang terjadi.

Setelah dikaji secara mendalam fenomena calon tunggal yang terjadi di Kabupaten Pati dikarenakan figur Haryanto yang merupakan seorang petahana sangatlah kuat dan memiliki tingkat elektabilitas tinggi. Sedangkan figur Saiful Arifin yang merupakan seorang pengusaha dianggap kuat secara ekonomi. Sehingga partai-partai politik di Kabupaten Pati merasa tidak ada kader-kader mereka yang mampu menyaingi pasangan Haryanto-Arifin yang kuat baik secara politik maupun ekonomi. Munculnya satu pasang calon ini memicu timbulnya kelompok masyarakat yang berusaha memenangkan kotak kosong dengan harapan adanya Pilkada ulang di tahun 2018 sehingga potensi tokoh-tokoh lain dapat muncul.

Prosesi kaderisasi dan rekrutmen politik yang melekat pada fungsi utama partai politik seharusnya mampu melahirkan figur-figur yang kuat secara politik. Namun di Kabupaten Pati semua partai seakan tidak melakukan fungsi-fungsinya dengan optimal karena partai sendiri tidak percaya dengan potensi kader dan kekuatan mesin partainya sendiri. Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasang calon yang harus melawan kotak kosong menjadi sebuah kontestasi demokrasi yang tidak ideal.

Kata kunci: Pilkada 2017, Calon Tunggal, Kotak Kosong, Rekrutmen dan Kaderisasi Politik

The Analysis of Recruitment and Regeneration Political Party in the Phenomenon of Single Candidate in Pati Local Election 2017

Danny Widodo Uji Prakoso
Politik and Government Departement Diponegoro University
prakosodanny@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the phenomenon of Regional Head Election (Pilkada) in Pati District in 2017 which is very interesting to be studied because it is only followed by one pair of candidates who have to compete with empty boxes. This phenomenon can be attributed to the procession of recruitment and recruitment of political parties in Pati Regency because 8 of 9 political parties prefer to carry one candidate, while one other party can not carry the candidate because the number of seats owned is less. The purpose of this research is to know what factors happened in internal political party especially related to applying of regeneration function and political recruitment and candidate procession in all parties so that only one pair of candidates appeared. The method used is qualitative descriptive by conducting interviews to all political parties in Pati Regency and also to community leaders in Pati Regency regarding their response to the phenomenon that occurred.

Having studied in depth the single candidate that occurred in Pati district because the figure of Haryanto who is a incumbent is very strong and has a high level of elektability. While Saiful Arifin figure who is a businessman is considered strong economically. So that the political parties in Pati Regency feel there are no one member who are able to compete with Haryanto-Arifin the stong pair both politically and economically. The emergence of a pair of candidates has triggered a group of people trying to win empty boxes in the hope of a repeat election in 2018 so that potential other figures can emerge.

The process of regeneration and political recruitment inherent in the main function of political parties should be able to produce politically powerful figures. But in Pati Regency all parties seemed to not perform its functions optimally because the party does not believe the potential of cadres and the power of his own party machine. Pilkada which was only followed by a pair of candidates who had to fight empty boxes became an unfeasible democratic contestation.

Keywords: Pilkada 2017, Single Pair Candidate, Empty Box, Regeneration and Political Recruitment

Pendahuluan

Prosesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pati tahun 2017 sangatlah menarik untuk dikaji karena hanya diikuti satu pasang calon yang harus bersaing dengan kotak kosong. Fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan proses kaderisasi dan rekrutmen partai politik di Kabupaten Pati. Keputusan delapan dari sembilan partai politik yang menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati untuk mengukung pasangan Haryanto dan Saiful Arifin patut untuk dikaji karena figur Haryanto dan Saiful Arifin sebenarnya bukanlah kader atau anggota partai manapun. Partai politik di daerah dinilai belum mampu menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik dalam mengukung calon kepala daerah. Meskipun, pada aturannya dalam Pilkada diperbolehkan mengajukan diri secara perorangan atau *independent*, tetap saja, pemeran utama yang harus dominan adalah partai politik karena Pilkada adalah agenda politik yang sangat strategis untuk memperoleh kekuasaan di daerah.

Fakta empirik ini timbul karena partai politik di Kabupaten Pati seakan lebih percaya dengan kekuatan Haryanto yang merupakan petahana. Padahal, kaderisasi dan rekrutmen politik menurut Budiardjo (2008, hlm. 405) merupakan salah satu dari empat fungsi utama partai politik yaitu fungsi komunikasi politik, sosialisasi ataupun pendidikan politik, dan pengatur konflik. Secara teoritis, dalam negara demokrasi partai politik relatif mampu menjalankan fungsinya. Sebagaimana Budiardjo (2008, hlm. 405) partai politik menjadi tempat bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di depan penguasa. Namun, secara praktis kondisi partai-partai politik di negara demokrasi belum dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Indonesia merupakan salah satu contohnya. Kebanyakan partai politik di Indonesia pada umumnya memiliki masalah yang serius hampir seluruh aspek, mulai dari kapasitas organisasional hingga ideologi. Akibatnya sangat jelas, alih-alih menjalankan fungsi mediasi dan moderasi kepentingan konstituen, pendidikan politik, dan rekrutmen politik, kebanyakan partai politik lebih sibuk bertikai

satu sama lain dan, lebih buruk dari itu, bertikai di internal anggota partai di hampir setiap kali mereka harus membuat kebijakan dan keputusan penting partai. (Meyer, 2008, hlm.22).

The Indonesian Institute (dalam Imansyah, 2012, hlm.2) menyatakan bahwa partai politik di Indonesia belum optimal dalam rekrutmen. Partai politik terindikasi gagal dalam menjalankan proses rekrutmen politik secara demokratis, transparan dan berbasis meritokrasi. Pengkaderan untuk internal partai seringkali dilakukan melalui cara-cara yang kental dengan kartelisme. Persoalan ini juga terjadi di daerah. Sebagaimana contoh adalah Kabupaten Pati pada Pilkada 2017 memberi gambaran bahwa fungsi partai politik tidak berjalan dengan baik. Secara khusus penelitian ini fokus pada prosesi rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada Pilkada Pati 2017 yang seakan tidak berjalan karena hampir semua partai politik mengusung pada satu pasang calon yaitu Haryanto dan Saiful Arifin yang sebenarnya bukanlah kader partai politik manapun.

Keputusan partai-partai politik untuk mengusung Haryanto dan Saiful Arifin secara politik dapat dikatakan menarik untuk dikaji mendalam, karena seharusnya partai politik mampu menjalankan proses kaderisasi yang berfungsi untuk menyiapkan kadernya menduduki jabatan strategis di internal partai ataupun menduduki jabatan strategis di pemerintahan mulai tingkat daerah hingga pusat. Sebenarnya jika melihat data hasil Pemilu Legislatif Kabupaten Pati Tahun 2014 secara implisit merefleksikan peta kekuatan partai politik di Kabupaten Pati. Ada 2 partai politik yang dapat dikatakan sangat kuat yaitu PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang memiliki 8 kursi di DPRD. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra mampu mengungguli 10 partai politik lain pada setiap daerah pemilihan (dapil).

Prolehan kursi setiap partai di DPRD, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra menjadi partai paling kuat dengan memperoleh kursi terbanyak yaitu 8 kursi, Golkar, Partai Demokrat dan PKB pada urutan kedua dengan memperoleh 6 kursi, PKS memperoleh 5 kursi, selanjutnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Hanura mampu memperoleh 4 kursi, dan partai yang memperoleh kursi paling sedikit adalah PPP dengan 3 kursi,.

Sedangkan 3 partai lainnya yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sama sekali tidak memperoleh kursi karena suara yang diperoleh kurang dari ambang batas yang telah ditentukan di setiap dapil. Total keseluruhan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pati ada 50 kursi.

Berdasarkan pada aturan yang berlaku yaitu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2016, pada ayat 5 pasal ayat 2, yang juga senada dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 40 ayat 1 bahwa persyaratan menjadi calon kepala daerah harus memiliki dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini menunjukkan bahwa jika di Kabupaten Pati syarat kursi paling sedikit untuk maju menjadi calon kepala daerah adalah 20% dari 50 kursi DPRD atau minimal harus memiliki 10 kursi di DPRD.

Partai-partai politik yang memilih mengukung pasangan Haryanto-Arifin yaitu, dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PDI Perjuangan, PPP, PKB, dan Partai Hanura. Apabila diakumulasikan jumlah kursi DPRD yang dimiliki partai-partai pengukung itu adalah 46 kursi atau mencapai 92% dari total 50 kursi di DPRD Kabupaten Pati. Koalisi delapan partai politik untuk mengukung pasangan Haryanto-Arifin dapat disebut kurang ideal. Hanya ada satu partai yang memilih untuk tidak ikut berkoalisi yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang hanya memiliki 4 kursi atau 8% dari seluruh kursi di DPRD Kabupaten Pati. Partai Nasdem yang hanya memiliki 4 kursi tentu tidak dapat mengukung calonnya. Pilkada Pati 2017 memunculkan persaingan yang kurang ideal karena hanya ada satu pasang kandidat yang pada akhirnya dilawankan dengan kotak kosong.

Budiardjo (2008, hlm. 408) menyatakan bahwa fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan di internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Kasus munculnya pasangan calon tunggal di Pilkada Pati 2017 yang didukung oleh 8 partai politik sangat menunjukkan adanya ketidaksempurnaan partai politik dalam menjalankan fungsi-

fungsinya, khususnya dalam fungsi kaderisasi dan sarana rekrutmen politik. Partai politik di Kabupaten Pati dinilai belum mampu menyiapkan kader-kadernya untuk dijadikan kandidat pada Pilkada 2017.

Pilkada yang mengharuskan calon tunggal bersaing dengan kotak kosong tentu bukanlah prosesi terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peristiwa politik semacam ini harus dicari penyebab utamanya serta dicari solusi terbaik untuk membuat partai politik di Indonesia mampu menjalankan fungsinya dengan optimal, utamanya dalam fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai penerapan fungsi-fungsi utama partai politik. Penelitian ini dilakukan agar faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena calon tunggal petahana dalam Pilkada dapat diketahui dengan baik.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif agar mempermudah peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data. Penelitian ini akan menggali secara mendalam mengenai pola rekrutmen dan kaderisasi politik yang dilakukan oleh partai-partai politik di Kabupaten Pati. Peneliti mencoba mengumpulkan data agar fenomena mengenai munculnya calon tunggal petahana dalam Pilkada Kabupaten Pati 2017 yang berhubungan dengan proses rekrutmen dan kaderisasi politik dapat ditemukan fakta sebenarnya agar fenomena serupa dapat diantisipasi pada Pilkada atau Pemilu selanjutnya. Moleong (2007, hlm. 6) mendefinikan penelitian kualitatif merupakan suatu desain penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara utuh, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Konfigurasi Partai Politik : Distribusi kekuasaan yang hampir merata

Berdasarkan pada Berita Acara KPU Kabupaten Pati tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pati Pemilu 2014, konfigurasi partai politik di Kabupaten Pati tidak jauh beda dengan kondisi politik di Indonesia pada umumnya. Perolehan suara hampir merata di setiap dapil. Kabupaten Pati terdiri dari 21 Kecamatan yang terbagi kedalam 5 daerah pemilihan (dapil). Setiap dapil di Kabupaten Pati terdiri dari 4 hingga 5 kecamatan Secara lebih detail pembagian dapil Pemilu 2014 di Kabupaten Pati sebagai berikut:

- Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Pati, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margorejo.
- Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Dukuhseti.
- Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Juwana, Kecamatan Batangan, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Trangkil.
- Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi.
- Dapil 5 terdiri dari Kecamatan Gabus, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo.

Konfigurasi partai politik di Kabupaten Pati yang mampu menduduki kursi DPRD Kabupaten Pati periode 2014-2019 hanya terdiri dari 9 partai politik dari 12 partai peserta Pemilu. PAN, PBB, dan PKPI belum mampu mendapat kursi di DPRD Kabupaten Pati. Partai-partai politik yang memperoleh kursi tersebut terdiri dari PDI Perjuangan dan Partai Gerindra memperoleh 8 kursi, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKB memperoleh 6 kursi, PKS memperoleh 5 kursi, selanjutnya Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Hanura mampu memperoleh 4 kursi, dan partai yang memperoleh kursi paling sedikit adalah PPP dengan 3 kursi. Hal ini menunjukkan konfigurasi partai politik mulai dari golongan kuat, menengah dan yang mempunyai kursi paling sedikit.

Karakter Politik Masyarakat Kabupaten Pati

Seperti yang diungkapkan Affan Gaffar (1988, hlm 7) terdapat dua model pendekatan dalam memnjelaskan etnografi politik masyarakat. Pendekaan tersebut adalah Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Psikologis. Pendekatan Sosiologis berasumsi bahwa perilaku memilih seseorang ditentukan oleh karakteristik sosiologis, terutama kelas sosial, agama, kelompok etnik, dan kedaerahan. Pendekatan Psikologis berasumsi bahwa faktor-faktor kesamaan sosiologis tersebut dipengaruhi oleh persepsi dan sikap, baik terhadap faktor-faktor sosiologis maupun terhadap partai politik ataupun kandidat. Salah satu variabel utama dari pendekatan psikologis adalah identifikasi (perasaan keterlibatan dan rasa memiliki yang ada dalam diri) seseorang atau individu terhadap partai politik.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Afan Gaffar (1988, hlm 7) masyarakat Kabupaten Pati memiliki karakteristik beragam dikarenakan latar belakang yang berbeda-beda disetiap wilayah. Secara umum, karakteristik masyarakat pada tulisan ini dikelompokkan menjadi 3 karakterisitik utama yaitu kelompok masyarakat santri, kelompok masyarakat abangan, dan masyarakat urban. Pembagian kelompok masyarakat ini sesuai dengan klasifikasi sosial yang diungkapkan oleh Geertz (1960) yang membagi masyarakat kedalam tiga kelompok, yaitu santri, abangan, dan priyayi. Tetapi dalam kasus ini masyarakat Kabupaten Pati golongan priyayi dapat digeser dengan klasifikasi jenis masyarakat urban atau masyarakat perkotaan. Karakteristik tersebut lebih sesuai dijadikan acuan masyarakat Kabupaten Pati daripada digolongkan kepada kelompok priyayi.

Wilayah dapil 1 yang terdiri dari Kecamatan Pati, Kecamatan Gembong, Kecamtan Tlogowungu, dan Kecamatan Margorejo. Wilayah ini merupakan area perkotaan dan daerah-daerah penglaju perkotaan. Pada Wilayah dapil 1 ini relatif unggul telak untuk pasangan Haryanto-Arifin, hanya wilayah Kecamatan Pati yang perolehan suaranya tidak terlalu signifikan.

Wilayah Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Dukuhseti. Wilayah ini identik dengan masyarakat yang agamis dan religius. Perolehan suara Haryanto di wilayah ini cukup unggul khususnya di Kecamatan Cluwak yang perolehannya sangat signifikan.

Wilayah dapil 3 terdiri dari Kecamatan Juwana, Kecamatan Batangan, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Trangkil. Wilayah ini memiliki karakteristik masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari laut. Dapil ini merupakan basis utama calon Bupati Haryanto karena beliau berasal dari daerah ini yaitu dari Kecamatan Batangan. Haryanto-Arifin hanya unggul telak di Kecamatan Batangan yang merupakan Kecamatan asal Haryanto.

Selanjutnya adalah wilayah dapil 4 terdiri dari Kecamatan Jaken, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi. Pada wilayah ini karena termasuk wilayah yang tertinggal membuat akses informasi dan pemahaman masyarakat terhadap isu politik masih rendah sehingga Haryanto-Arifin mampu unggul telak.

Terakhir adalah wilayah dapil 5 yang terdiri dari Kecamatan Gabus, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo. Pada wilayah ini Haryanto unggul namun pemilih kotak kosong juga relatif banyak.

Secara umum, karakteristik masyarakat Kabupaten Pati berimbang antara kaum Santri dan kaum Abangan, sedangkan masyarakat urban hanya terdapat di pusat kota. Hal ini seperti halnya yang sering terjadi di wilayah provinsi Jawa tengah pada umumnya, dimana antara kaum santri dan abangan hidup bersama dalam satu wilayah. Hasil Pilkada Pati 2017 apabila dilihat secara keseluruhan Haryanto-Arifin unggul dengan 74,51% atau sejumlah 519.627 suara, sedangkan kotak kosong memperoleh 25,49 % atau sejumlah 697.398 suara. Angka golput pada Pilkada Pati 2017 sangatlah besar yaitu mencapai 325.429 orang dari total DPT sejumlah 1.037.850 atau sekitar mencapai 31,35 % dari jumlah pemilih tetap.

Kompleksitas Politik diantara Partai Politik dalam Pilkada Pati 2017

Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 menunjukkan suatu peristiwa politik yang sangat kompleks. Munculnya calon tunggal dan gerakan relawan yang berusaha memenangkan kotak kosong di Pilkada Pati tahun 2017 sangat menarik untuk dikaji secara mendalam. Keberadaan tokoh ataupun figur potensial yang dirasa layak maju dalam kontestasi Pilkada di Pati dapat dikatakan tidak sedikit, partai-partai juga sebenarnya memunyai kesempatan yang sangat baik untuk mengusung kader-kader potensialnya, tapi ternyata pada akhirnya Pilkada Pati tahun 2017 hanya diikuti oleh satu pasang calon yaitu Bupati Petahana, Haryanto yang dipasangkan dengan seorang pengusaha asal Pati yang dapat dikatakan sebagai figur pengusaha muda yang sukses menjalankan roda bisnisnya di beberapa sektor, yaitu Saiful Arifin.

Sebagai seorang petahana, sosok Haryanto memang sangat diuntungkan dan memiliki posisi strategis untuk dapat kembali berkompetisi memperebutkan kursi Pati 1 atau jabatan Bupati Pati. Masyarakat Pati memang sudah sangat mengenal Haryanto, sehingga seakan elektabilitasnya tidak dapat disaingi oleh tokoh-tokoh lain. Kinerja beliau selama menjadi Bupati di periode 2012 hingga 2017 juga dapat dikategorikan baik, meskipun kekurangan-kekurangan juga sebenarnya ada, namun karena minimnya sorotan dari media sehingga ketidaksempurnaan jalannya roda pemerintahan Kabupaten Pati tidak terlalu terlihat.

Partai pengusung Haryanto-Arifin selain beralasan karena rekomendasi DPP banyak juga partai yang merasa tidak mampu melahirkan kader-kader yang dapat bersaing di Pilkada karena berbagai pertimbangan. Partai merasa kader-kadernya kurang siap apabila mengikuti kontestasi Pilkada Pati 2017. Daripada mengusung kader dan akhirnya kalah maka mereka mencari aman dengan bergabung kedalam koalisi, karena mereka sadar bahwa Pilkada Pati merupakan Pilkada yang membutuhkan ongkos politik yang tinggi.

Pilkada Pati dianggap sebagai Pilkada dengan ongkos biaya tinggi karena mayoritas masyarakat Kabupaten Pati merupakan masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi. Karakteristik pemilih

pedesaan seperti itu sangat mudah dipengaruhi dengan *money politik* hal ini serupa dengan yang terjadi di desa Mranggen, Kabupaten Demak dalam Tawakkal (2017, hlm. 42) dengan contoh kasus Pilkada di Mranggen, tim pasangan calon memerlukan tim yang menyebarkan uang ke masyarakat dan memastikan masyarakat memilih calon tersebut. Sehingga biaya tinggi akan dikeluarkan untuk memenangkan sebuah kontestasi demokrasi. Tindakan seperti ini biasanya dilakukan di pedesaan, dan Kabupaten Pati yang mayoritas adalah kawasan pedesaan juga rawan tindakan seperti ini, oleh karena itu ongkos politik di Kabupaten Pati cukup tinggi karena pengaruh jumlah luas wilayah yang sangat luas dan juga jumlah pemilih yang sangat banyak.

Selain ongkos politik yang tinggi dalam Pilkada Pati peluang petahana untuk menang dalam Pilkada Pati sangat besar karena jaringan politik yang telah dibangun selama 5 tahun masa kepemimpinannya dapat mendukung kemenangannya. Modal sosial yang dimiliki juga menjadikan tingkat elektabilitas dan popularitasnya susah untuk ditandingi. Sehingga partai pun lebih memilih bergabung dalam koalisi karena peluang menangnya lebih besar.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Partai Nasdem sebagai satu-satunya partai yang memilih untuk tidak ikut kedalam koalisi ternyata memiliki berbagai pertimbangan dan alasan mengapa Partai Nasdem bersikap demikian. Meskipun Partai Nasdem menyatakan bahwa pemerintahan Haryanto juga masuk kedalam kategori baik, namun Partai Nasdem berusaha memberikan pendidikan politik ke masyarakat Kabupaten Pati. Partai Nasdem merasa apabila pada akhirnya mereka bergabung kedalam koalisi maka pembelajaran politik yang seharusnya didapat masyarakat seakan tidak berjalan, dan partai seakan hanya mencari aman. Partai Nasdem setuju bahwa sebenarnya tokoh-tokoh Kabupaten Pati yang sebenarnya dapat dikatakan layak untuk bersaing dalam Pilkada jumlahnya banyak, sehingga ketika itu Partai Nasdem sempat membuka pendaftaran bakaln calon dengan tagline tanpa uang tapi pada akhirnya Nasdem tidak mengusung siapapun.

Sikap politik Partai Nasdem ini dilakukan juga dengan harapan bahwa di pemilu kedepannya yaitu Pileg 2019 mereka berharap mendapat suara dari simpatisan-simpatisan yang pada Pilkada 2017 memiliki sikap politik yang sama. Sehingga suara yang diraih Partai Nasdem dapat lebih optimal dan dapat memperoleh jumlah kursi yang cukup untuk mencalonkan kepada daerah pada Pilkada Pati periode selanjutnya yaitu Pilkada tahun 2022.

Semua tokoh politik di Kabupaten Pati menilai kepemimpinan seorang Haryanto sudah baik, bahkan Partai Nasdem sebagai partai oposisi yang tidak ikut berkoalisi mendukung Haryanto-Arifin pun secara normatif menilai kalau kinerja Haryanto sebagai Bupati Pati juga dapat dikategorikan baik. Penilaian baik kepada Haryanto inilah yang mendasari dukungan partai-partai di Kabupaten Pati untuk Haryanto. Hampir semua partai menjadikan kepemimpinan Haryanto yang dinilai baik serta elektabilitas yang tinggi sebagai pertimbangan untuk menentukan sikap mengukung Haryanto. Dinamika yang terjadi dimasing-masing partai dalam proses kandidasi cukup menarik untuk dikaji, sehingga untuk lebih jelasnya maka akan disajikan analisis dinamika politik di masing-masing partai.

Tabel Sikap Partai Politik Kabupaten Pati dalam Pilkada 2017

No.	Partai	Sikap Politik
1.	PDI-Perjuangan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menilai Haryanto adalah sosok yang bagus dalam memimpin Pati, memiliki elektabilitas tinggi dan telah berhasil melewati serangkaian tes di DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Pati. ➤ Mengukung Haryanto karena rekomendasi dari DPP jatuh kepada Haryanto dan Saiful Arifin dianggap sebagai kader PDI-Perjuangan meskipun hanya sekedar kader di organisasi sayap.
2.	Partai Gerindra	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menilai figur Haryanto adalah sosok yang baik dalam menjalankan pemerintahan dan memiliki elektabilitas tinggi ➤ Mencoba mengukung kadernya menjadi wakil namun tidak jadi karena dianggap belum ada kader yang tepat

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menilai Saiful Arifin sebagai figur yang kuat secara politik dan ekonomi sehingga setuju mengusungnya sebagai Wakil Bupati
3.	Partai Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menilai figur Haryanto dalam menjalankan pemerintahan sangat baik ➤ Menilai tidak ada kader internal yang dapat dikatakan siap mendampingi Haryanto ➤ Membebaskan Haryanto memilih wakilnya
4.	Partai Golkar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menilai sosok Haryanto adalah sosok yang baik dan memiliki elektabilitas tinggi ➤ Membebaskan Haryanto memilih wakil ➤ Merasa tidak ada kader yang tepat dan siap untuk maju dalam Pilkada 2017
5.	PKB	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menilai Haryanto sebagai figur terbaik karena elektabilitasnya tidak ada yang bisa mengalahkan ➤ Menilai tingkat elektabilitas Haryanto yang tinggi adalah penghambat munculnya calon lain ➤ Pada awalnya berusaha mengusung kadernya yaitu M. Budiono dan juga figur lain yaitu Sudewa, namun tidak ada titik temu karena keduanya sama-sama ingin menjadi Bupati ➤ Mendukung Haryanto-Arifin karena baru bergabung ke koalisi ketika pasangan calon sudah terbentuk
6.	PPP	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menilai Haryanto sangat baik dalam menalakan pemerintahan ➤ Tidak ada kader yang siap bersaing dalam Pilkada 2017
7.	Partai Hanura	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menilai periode pertama pemerintahan Haryanto belum 100% namu dapat dikatakan sangat baik ➤ Tidak ada kader yang siap dalam Pilkada

8.	PKS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menilai Haryanto figur yang tepat untuk memimpin Pati ➤ Sempat memunculkan kadernya, namun dianggap belum mampu mengalahkan Haryanto sehingga akhirnya bergabung kedalam koalisi
9.	Partai Nasdem	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menilai Haryanto adalah figur yang masih dalam kategori baik ➤ Menilai tokoh di Kabupaten Pati ada banyak namun ada kendala dalam kendaraan politik ➤ Mencoba mencari simpati masyarakat untuk Pemilu 2019 dengan tidak masuk koalisi ➤ Mencoba memberi pembelajaran politik ke masyarakat sehingga tidak ikut kedalam koalisi ➤ Menyayangkan sikap partai lain, namun menganggap wajar karena dalam demokrasi bebas memilih dalam arti ikut berkoalisi atau tidak

Terbentuknya Pergerakan Relawan Kotak Kosong

Terbentuknya kelompok masa yang mendukung kotak kosong dilatar belakangi oleh rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap prosesi Pilkada dan juga ketidakpuasan terhadap figur Haryanto itu sendiri. Kelompok ini bergerak secara terstruktur dan menyeluruh di semua wilayah Kabupaten Pati. Dalam pergerakannya relawan kotak kosong menggandeng tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai kesamaan visi dengan mereka.

Isu mengenai ijin pendirian pabrik semen tetaplah isu utama yang diangkat, karena keberadaan pabrik di Pegunungan Kendeng jelas akan merusak kelesatarian lingkungan di Kabupaten Pati khususnya wilayah selatan. Alasan kedua adalah penutupan potensi tambang Batu di Gunungwungkal, padahal jelas-jelas itu sangat mendukung perekonomian masyarakat Gunungwungkal dan Pati utara pada umumnya. Yang ketiga adalah mengenai sertifikat tanah, ketika Haryanto mau mencalonkan diri tiba-

tiba harga pembuatan sertifikat tanah turun dan menjadi murah, tapi sekarang mulai saat beliau resmi diputuskan KPU memang dalam Pilkada dan kembali aktif menjadi Bupati harga sertifikat tanah tiba-tiba melonjak naik bahkan dihitung berdasarkan NJOP. Dan yang keempat adalah tata kelola birokrasi yang buruk, di salah satu Kecamatan ketika Haryanto memasuki masa terakhir periode pertamanya tiba-tiba dia mengangkat camat yang berlatar belakang dari seorang mantri hewan. Padahal di Kabupaten Pati sebenarnya masih banyak orang yang seharusnya lebih tepat dijadikan camat. Secara keseluruhan sebenarnya ada 12 alasan yang mendasari gerakan relawan kotak kosong bergerak melawan Haryanto, tapi alasan utamanya diantaranya seperti yang sudah disebutkan oleh narasumber.

Massa yang tergabung dalam relawan kotak kosong tidak lepas dari kelompok masyarakat peduli kendeng dan kelompok lainnya yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Haryanto. Tokoh-tokoh masyarakat juga banyak yang bersimpati dengan relawan kotak kosong. Bahkan adapula tokoh parpol yang dirasa ikut bersimpati kepada relawan kotak kosong meskipun bentuk dukungan itu tidak secara langsung karena tentu kader partai tersebut takut terhadap sanksi dari partai apabila ketahuan melawan keputusan partai untuk memenangkan Haryanto. Selain itu, ada pula dukungan dari partai politik yaitu Partai Nasdem, meskipun dukungan dari Partai Nasdem merupakan dukungan yang bersifat dukungan moril namun menurut kelompok relawan kotak kosong dorongan dari beberapa tokoh dan partai politik tersebut sudah cukup untuk memaksimalkan pergerakan hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Pati.

Alasan munculnya pergerakan kotak kosong adalah apabila kotak kosong menang, sesuai dengan aturan yang berlaku maka Pilkada 2017 akan diulang dalam Pilkada 2018. Kelompok masa tersebut berharap jika pada Pilkada 2018 nanti sikap partai dapat berubah dan opsi calon bagi masyarakat akan bertambah, tidak hanya pada satu figur saja. Apabila pilihan yang ditawarkan ke masyarakat tidak hanya satu pasang calon maka persaingan para kandidat untuk memperebutkan simpati masyarakat menjadi sebuah persaingan ideal yang semestinya terjadi dalam Pilkada.

Analisis Kaderisasi dan Rekrutmen Politik pada Pilkada Pati 2017

Partai Politik merupakan elemen penting dalam negara demokrasi. Melalui partai politik masyarakat dapat turut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara. Sebagai suatu lembaga politik, partai politik memiliki peran dan fungsi yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Kurang sempurnanya penerapan peran dan fungsi partai politik maka akan menimbulkan masalah serius bagi suatu negara demokrasi.

Pada peristiwa Pilkada Pati 2017 penerapan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik seakan tidak berjalan dengan baik. Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasang calon tersebut merefleksikan kurang berjalannya fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik. Beberapa partai di Kabupaten Pati berpendapat bahwa sebenarnya mereka telah menjalankan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik mereka, namun memang kualitas kader yang mereka miliki dianggap belum layak untuk bersaing dalam Pilkada. Hal inilah yang membuat partai-partai lebih memilih menginduk kepada koalisi Haryanto-Arifin. Sedangkan beberapa partai lain telah berusaha mencoba mengusung kadernya namun pada akhirnya dengan alasan popularitas, kualitas dan elektabilitas akhirnya partai-partai tersebut mengambil sikap untuk ikut kedalam koalisi.

Lay, dkk (2017, hlm. 432) mengungkapkan bahwa persaingan dalam Pilkada Pati yang kurang ideal ini merupakan dampak langsung dari pasangan calon Haryanto-Arifin. Haryanto seorang petahana dan pasangannya Saiful Arifin seorang pengusaha kaya. Keduanya bergabung menjadi suatu kombinasi yang kuat secara ekonomi, jaringan politik dan modal sosial yang bagus. Apabila mereka bertarung dalam Pilkada dengan posisi saling melawan pasti persaingan dalam Pilkada Pati akan sangat sengit, namun jika mereka bergabung dan saling melengkapi maka tidak ada kandidat lain yang berani melawannya.

Sebenarnya kader-kader partai politik yang ada bukanlah kader yang tidak punya potensi dan memiliki kualitas buruk. Hampir semua figur yang pernah muncul dan berpotensi untuk dicalonkan dalam Pilkada Pati 2017

memiliki rekam jejak yang bagus, bahkan ada pula yang pernah menduduki jabatan strategis di tingkat nasional ataupun Kabupaten Pati. Namun memang sikap politik partai yang seakan lebih mencari aman untuk dapat menang dalam Pilkada Pati membuat partai-partai politik lebih memilih untuk berkoalisi memenangkan Haryanto-Arifin.

Prosesi kaderisasi dan rekrutmen politik yang berjalan memang berhasil melahirkan beberapa sosok politisi ataupun figur yang dapat dikatakan bagus, namun dengan sikap partai yang tidak menghargai kadernya sendiri itu menunjukkan ada yang proses yang tidak berjalan dengan baik di dalam partai. Ketidakpercayaan partai terhadap kadernya menunjukkan bahwa proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang dijalankan kurang berjalan dengan baik.

Pilkada Pati dan Pertarungan atas Demokrasi yang Ideal

Pilkada Pati yang hanya diikuti oleh satu pasang calon yang harus menghadapi kotak kosong merefleksikan peran dan fungsi partai yang tidak berjalan dengan baik. Menurut Prof. Ambardi (2008) suatu pemilihan umum yang diikuti oleh lebih dari satu calon merupakan suatu indikasi sistem kepartaian yang kompetitif. Dari pernyataan tersebut dapat direfleksikan bahwa apabila suatu pemilihan umum yang diikuti hanya satu calon dapat menunjukkan bahwa partai-partai tidak mampu menerapkan sistem yang kompetitif. Hal ini menjadikan kompetisi dalam pemilu dapat dikatakan kurang ideal.

Kurang idealnya Pilkada Pati juga diakibatkan karena partai-partai seakan takut untuk mengusung kadernya agar ikut berkontestasi memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Pati untuk periode 2019-2022. Peta persaingan dalam Pilkada Pati 2017 hanya terjadi antara koalisi pengusung Haryanto-Arifin yang terdiri dari PDI-P, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Hanura, PKS, PKB, PPP dengan melawan relawan kotak kosong juga kurang terlihat, karena relawan kotak kosong merasa tidak diakui oleh penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten Pati) sebagai peserta Pemilu. Partai Nasdem yang memilih untuk tidak masuk kedalam koalisi beralasan ingin memberikan pendidikan politik kepada

masyarakat Kabupaten Pati. Posisi yang dipilih oleh Partai Nasdem ini justru begitu tidak jelas, karena Partai Nasdem yang hanya memiliki 4 kursi jelas tidak bisa mengusung calon lainnya untuk melwan Haryanto-Arifin. Partai Nasdem justru malah dikabarkan menjadi pendukung relawan kotak kosong karena ketidakjelasan posisinya di Pilkada Pati 2017.

Apapun alasan masing-masing partai baik mengusung ataupun tidak mengusung Haryanto-Arifin dalam memandang prosesi Pilkada Pati sebagai prosesi politik terbesar di Kabupaten Pati. Peneliti menyimpulkan bahwa prosesi Pilkada Pati 2017 bukanlah Pilkada yang ideal. Persaingan yang sangat tidak dan serta kurang berhasilnya partai melakukan proses kaderisasi dan rekrutmen politik, serta dominannya calon petahana, menunjukkan ketidakidealan prosesi Pilkada Pati 2017.

Simpulan

Haryanto sebagai seorang figur petahana Bupati Pati disara oleh partai politik sebagai sosok yang sulit untuk dikalahkan. Padahal apabila partai mampu mengoptimalkan mesin-mesin partainya yang ada hingga ke tingkat ranting di desa tentu bukan tidak mungkin siapapun yang diusung akan mampu memperoleh suara optimal. Anggota ataupun kader partai di level akar rumput atau ditataran bawah pasti akan lebih militan dalam bergerak apabila yang diusung adalah kader dari partainya sendiri. Namun nyatanya, kekuatan dari sosok Haryanto sebagai petahana telah berhasil meruntuhkan kepercayaan diri partai politik terhadap proses kaderisasinya. Kader-kader yang dihasilkan oleh masing-masing partai dinilai oleh partainya sendiri sebagai sosok yang kurang mampu bersaing dalam Pilkada Pati.

Partai menganggap kader-kadernya kurang mampu untuk memimpin Kabupaten Pati dengan berbagai pertimbangan. Dengan begitu dapat diartikan bahwa partai politik di Kabupaten pati tidak berhasil dalam menyiapkan kadernya dan dinilai tidak berhasil merekrut tokoh-tokoh politik potensial untuk partai, proses penerapan fungsi kaderisasi dan rekrutmen politik yang seharusnya dilakukan partai politik seakan tidak berjalan sempurna. Bagaimanapun juga Pilkada merupakan agenda politik strategis, sehingga sangat disayangkan apabila partai tidak antusias mengambil peran dalam

prosesi Pilkada. Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasang calon bukanlah kontestasi politik yang bagus, karena kurangnya persaingan perebutan kekuasaan yang seharusnya terjadi. Sehingga kontestasi Pilkada Pati 2017 menjadi kontestasi demokrasi yang tidak ideal.

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia
- Fadjar, Abdul Mukthie. 2013. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press
- Haryanto. 1984. *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*. Yogyakarta: Liberty
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Vlekke, H.M Bernard. 2008. *Nusantara: Sejarah Indonesia*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Ambardi, Kuskridho. 2008. *The Making Of The Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System And Its Origin (Desertasi)*. Ohio State University
- Aspinall, Edward dan Wawan Mas'udi. 2017. *The 2017 Pilkada (Local Elections) in Indonesia: Clientelism, Programmatic Politics and Social Networks*. Contemporary Southeast Asia Vol. 39, No. 3
- Gaffar, Afan. 1988. *Javanese Voters: A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System: The Ohio State University*
- Haryanto. 2017. *Adaptation and Continuities in Clientelism in a Fishing Community in Takalar, South Sulawesi*. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Volume 39, Number 3, pp. 511-531
- Hidayah, Nurul. 2011. *Kesiapan Psikologis Masyarakat Pedesaan Perkotaan Menghadapi Diversifikasipangan Pokok*. Yogyakarta: Jurnal Humanitas Vol. VIII No. 1
- Lay, Cornellis dkk. 2017. *The Rise of Uncontested Elections in Indonesia: Case Studies of Pati and Jayapura*. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Volume 39, Number 3, pp. 427-448
- Mas'udi, Wawan dan Nanang Indra Kurniawan. 2017. *Programmatic Politics and Voter Preferences: The 2017 Election in Kulon*

Progo, Yogyakarta. Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Volume 39, Number 3, pp. 449-46

Meyer, Thomas. 2008. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Muwarni, Endah. 2015. *'Eating Out' Makanan Khas Daerah : Komoditas Gaya Hidup Masyarakat Urban*. Denpasar: Universitas Teknologi Indonesia

Permana, Yogi Setya. 2017. *When the Supporters Do Not Support: Politicizing a Soccer Fan Club in an Indonesian Election*. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Volume 39, Number 3, pp. 552-573*

Romli, Lili. 2011. *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. *Jurnal Politica Vol. 2 No. 2*

Sukanto. 2013. *Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik*. *Jurnal Teknologi Indonesia*

Tawakkal, George Towar Ikkal, dkk. 2017. *Consistency and Vote Buying: Income, Education, and Attitudes about Vote Buying in Indonesia*. *Journal of East Asian Studies 17*

Berita Acara KPU Kabupaten Pati tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Pati Pemilu 2014

Website :

www.kpu.go.id

www.patikab.go.id

www.kpu-patikab.go.id